



ISSN 2337-7771
e-ISSN 2337-7992

JURNAL HUTAN TROPIS

Berkala Ilmiah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kehutanan

HASIL AIR PENGGUNAAN LAHAN HUTAN DALAM MENYUMBANG ALIRAN SUNGAI

KAYU SISA PENJARANGAN DAN TEBANG HABIS HUTAN TANAMAN JATI

**PERENCANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN MELALUI ANEKA USAHA KEHUTANAN
(Studi di Dinas Kehutanan Kabupaten Malang)**

KINERJA INDUSTRI KAYU LAPIS DI KALIMANTAN SELATAN MENUJU EKOEFISIENSI

KARAKTERISTIK JENIS POHON PADA BERBAGAI TIPE LOKASI HUTAN KOTA DI PEKANBARU PROPINSI RIAU

KAJIAN DINAMIKA HARA TANAH PADA EMPAT PERLAKUAN

STRUKTUR DAN DIMENSI SERAT PELEPAH KELAPA SAWIT

**KAJIAN BENTANG LAHAN EKOLOGI FLORISTIK HUTAN RAWA GAMBUT BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUH
DI SUB DAS SEBANGAU**

**PENGARUH TEKNIK PENGENDALIAN PENYAKIT BENIH TERHADAP VIABILITAS BENIH TEMBESU
(*Fagraea fragrans* Roxb)**

KERUSAKAN TANAH YANG TERJADI AKIBAT SLIP PADA KEGIATAN PENGANGKUTAN KAYU

**UJI VIABILITAS DAN SKARIFIKASI BENIH BEBERAPA POHON ENDEMIK HUTAN RAWA GAMBUT
KALIMANTAN TENGAH**

ANALISA USAHA LEBAH MADU HUTAN DAN KUALITASNYA

DITERBITKAN ATAS KERJASAMA
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DENGAN
PERSATUAN SARJANA KEHUTANAN INDONESIA (PERSAKI) PUSAT



JHT

Volume 2

Nomor 1

Halaman
1-81

Banjarbaru
Maret 2014

ISSN 2337-7771



JURNAL HUTAN TROPIS

Berkala Ilmiah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kehutanan

DAFTAR ISI

HASIL AIR PENGGUNAAN LAHAN HUTAN DALAM MENYUMBANG ALIRAN SUNGAI Edy Junaidi	1-8
KAYU SISA PENJARANGAN DAN TEBANG HABIS HUTAN TANAMAN JATI Ahmad Budiawan, Devi Muhtarana, dan Nensi Yunita Irmawati	9-15
PERENCANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN MELALUI ANEKA USAHA KEHUTANAN (Studi di Dinas Kehutanan Kabupaten Malang) Hari Wijayanto, Agus Suryono dan Tjahjanulin Domai	16-23
KINERJA INDUSTRI KAYU LAPIS DI KALIMANTAN SELATAN MENUJU EKOEFISIENSI Darni Subari	24-34
KARAKTERISTIK JENIS POHON PADA BERBAGAI TIPE LOKASI HUTAN KOTA DI PEKANBARU PROPINSI RIAU Anna Juliarti	35-39
KAJIAN DINAMIKA HARA TANAH PADA EMPAT PERLAKUAN Ary Widiyanto	40-46
STRUKTUR DAN DIMENSI SERAT PELEPAH KELAPA SAWIT Lusita Wardani, Faisal Mahdie, dan Yusuf Sudo Hadi	47-51
KAJIAN BENTANG LAHAN EKOLOGI FLORISTIK HUTAN RAWA GAMBUT BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUH DI SUB DAS SEBANGAU Raden Mas Sukarna	52-59
PENGARUH TEKNIK PENGENDALIAN PENYAKIT BENIH TERHADAP VIABILITAS BENIH TEMBESU (<i>Fagraea fragrans</i> Roxb) Tati Suharti, Yulianti Bramasto dan Naning Yuniarti	60-64
KERUSAKAN TANAH YANG TERJADI AKIBAT SLIP PADA KEGIATAN PENGANGKUTAN KAYU Yuniawati dan Sona Suhartana	65-70
UJI VIABILITAS DAN SKARIFIKASI BENIH BEBERAPA POHON ENDEMIK HUTAN RAWA GAMBUT KALIMANTAN TENGAH Siti Maimunah	71-76
ANALISA USAHA LEBAH MADU HUTAN DAN KUALITASNYA Fatriani, Arfa Agustina Rezekiah, Adistina Fitriani	77-81

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada para penelaah yang telah berkenan menjadi Mitra Bestari pada Jurnal Hutan Tropis Volume 2 No. 1 yaitu:

Prof. Dr. Ir. M. Lutfhi Rayes, M.Sc
(Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya)

Prof. Dr. Ir. Wahyu Andayani, M.Sc
(Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada)

Prof. Dr. Hj. Nina Mindawati, M.S
(Puslitbang Produktivitas Hutan, Kementerian Kehutanan RI)

Prof. Dr. Ir. Syukur Umar, DESS
(Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako)

Prof. Dr. Ir. Baharuddin Mappangaja, M.Sc.
(Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin)

Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, M.S
(Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat)

Dr. Ir. Satria Astana, M.Sc.
(Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kementerian Kehutanan RI)

Dr. Ir. Kusumo Nugroho, MS
(Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian)

Dr. Ir. Cahyono Agus Dwikoranto, M.Agr.
(Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada)

Prof. Dr. Ir. Sipon Muladi
(Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman)

Prof. Dr. Ir. Djamal Sanusi
(Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin)

Dr. Sc. Agr. Yusran, S.P., M.P
(Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako)

KATA PENGANTAR

Salam Rimbawan,
Jurnal Hutan Tropis Volume 1 Nomor 3 Edisi November 2013 kali ini menyajikan 12 buah artikel ilmiah hasil penelitian kehutanan.

Edy Junaidi meneliti peranan hidrologi hutan (hutan alam dan hutan tanaman) terhadap aliran sungai ditinjau dari neraca air dengan membandingkan penggunaan lahan hutan dan penggunaan lahan lain.

Ahmad Budiaman, dkk meneliti besarnya kayu sisa dari kegiatan tebang habis kelas umur (KU) VII dan penjarangan KU VI Kayu jati (*Tectona grandis*) yang dikelola oleh Perum Perhutani.

Hari Wijayanto, dkk meneliti pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha kehutanan. Hasil penelitian ini menunjukkan proses perencanaan aneka usaha kehutanan sebagai usaha memberdayaan masyarakat sekitar hutan masih kurang maksimal.

Darni Subari meneliti kinerja industri kayu lapis di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri kayu lapis umumnya memiliki kesamaan dalam proses dan mesin produksinya

Anna Juliarti meneliti jenis-jenis pohon yang ditanam di lokasi Hutan Kota di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 7 spesies, 5 famili yang terdapat di median jalan, 12 spesies, 11 famili yang berada di pinggir jalan dan 26 spesies, 17 famili yang terdapat di taman-taman kota

Ary Widiyanto meneliti dinamika hara pada lahan agroforestri sengon-kapulaga dengan pemberian empat perlakuan yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis perlakuan dan kedalaman tanah tidak berpengaruh secara nyata terhadap kadar C, N dan P tanah, sedangkan waktu pengukuran berkorelasi dengan kadar C, N dan P tanah.

Lusita Wardani, dkk mengidentifikasi beberapa sifat anatomi pelepah sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tebal serat, diameter serat pelepah sawit serta diameter *metaxylem* dan tebal dinding selnya masing-

masing adalah 2328,3-2486,0 μ m; 26,2-27,0 μ m; 598,3-792,51 μ m, and 21,65-26,65 μ m.

Raden Mas Sukarna meneliti klasifikasi struktur hutan rawa yang akurat melalui model *Forest Canopy Density* Citra Landsat, dan model distribusi floristik hutan pada satuan bentang lahan berdasarkan integrasi spasial antara variasi struktur hutan dan tipe bentuk lahan.

Tati Suharti, dkk meneliti teknik pengendalian penyakit benih terhadap viabilitas benih tembesu (*Fagraea fragrans* Roxb).

Yuniawati dan Sona Suhartana meneliti kerusakan tanah yang terjadi akibat terjadinya slip pada saat kegiatan pengangkutan kayu di wilayah Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Ciguha, BKPH Cikawung, KPH Sukabumi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

Siti Maimunah meneliti indeks viabilitas benih untuk jenis-jenis yang tumbuh di hutan rawa gambut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya indeks viabilitas dipengaruhi oleh tingkat kemasakan buah dan ketepatan cara skarifikasi benihnya. Tumih dan pulai adalah jenis yang direkomendasikan untuk dikembangkan di lahan gambut terdegradasi.

Fatriani, dkk meneliti biaya, pendapatan dan keuntungan usaha lebah madu serta menganalisa kualitas madu yang dihasilkan oleh usaha lebah madu. Lokasi penelitian berada di Desa Telaga Langsung Kecamatan Tangkisung Kabupaten Tanah Laut

Semoga hasil penelitian tersebut dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca untuk dikembangkan di kemudian hari. Selamat Membaca.

Banjarbaru, Maret 2014

Redaksi,

**PERENCANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
MELALUI ANEKA USAHA KEHUTANAN
(Studi di Dinas Kehutanan Kabupaten Malang)**

*Community Development Forest Approximately Planning Through Various Forestry
Business (Studies in Malang Regency Forest Service)*

Hari Wijayanto, Agus Suryono dan Tjahjanulin Domai
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang

ABSTRACT. *Poverty of forest dwellers becomes a problem for land and forest ecosystems. Exploitation to meet the economic problems impact on environmental degradation. Empowerment absolutely necessary to improve the well-being without damaging the environment. Various of forestry business is an activity to empower forest communities with appropriate processing results and forest lands by providing value-added. Various of forestry business activities planning to empower forest communities is important for the development of business become maximum level. This study used a qualitative approach that aims to describe and analyze the empowerment of forest communities through various of forestry business. The results of this study indicate various of forestry business planning process for empowerment of forest communities is poor. Planning approaches used are a political, technocratic and top-down approach.*

Keyword: Planning, Empowerment, and Various of forestry business.

ABSTRAKSI. Kemiskinan masyarakat sekitar hutan menjadi pemasalahan bagi ekosistem lahan dan hutan. Eksploitasi untuk mencukupi masalah ekonomi berdampak pada kerusakan lingkungan. Pemberdayaan mutlak dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak lingkungan. Aneka usaha kehutanan merupakan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan mengolah secara tepat hasil lahan dan hutan dengan memberi nilai tambah ekonomis. Perencanaan kegiatan aneka usaha kehutanan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan penting dilakukan untuk pengembangan usaha menjadi maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha kehutanan. Hasil penelitian ini menunjukkan proses perencanaan aneka usaha kehutanan sebagai usaha memberdayakan masyarakat sekitar hutan masih kurang maksimal. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah pendekatan politis, teknokratis dan top-down.

Kata Kunci: Perencanaan, Pemberdayaan, dan Aneka Usaha Kehutanan.

Penulis Untuk Korespondensi, surel: wijayanto81@gmail.com

PENDAHULUAN

Hutan merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha di bidang

kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, pariwisata, dan ladang dan kebun bagi masyarakat.

Kerusakan hutan dan lahan ini memicu banyaknya bencana alam. Menurut data dari BNPB (2013a dan 2013b) pada tahun 2013 sampai dengan bulan mei tercatat sebanyak 128 kejadian tanah longsor, sedangkan bencana banjir tercatat pada tahun 2013 sebanyak 225 kali. Untuk wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2013 terjadi tanah longsor sebanyak 4 kali sedangkan untuk bencana banjir sebanyak 2 kali pada tahun 2013.

Jika menilai kerusakan lahan dan hutan yang terjadi, Awang (2004, h.134) menyebutkan bahwa pertambahan penduduk yang cepat, sehingga menyebabkan kepemilikan lahan setiap keluarga hanya berkisar 0,2-0,3 ha di Jawa dan 1-1,5 ha per kepala keluarga untuk di luar Jawa berdampak pada masalah sosial, politik, dan ekonomi. Kesempatan kerja dan berusaha khususnya dipedesaan sangat terbatas padahal angkatan kerja besar sehingga berdampak pada tingginya jumlah pengangguran. Hal serupa disampaikan oleh Budiman (1991, h.1) bahwa ketidakpedulian masyarakat pada konservasi alam disebabkan karena tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah, pemilikan lahan yang sempit dan tidak merata dan kesempatan kerja yang tersedia semakin sulit.

Mencermati pemberitaan kompas.com dan beritajatim.com dalam Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maliki Malang pada tanggal 21 Desember 2010, menyebutkan Kabupaten Malang merupakan daerah termiskin kedua di Provinsi Jawa Timur. Pernyataantersebut berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa 4,8 juta penduduk berada pada garis kemiskinan dimana Kabupaten Malang memiliki 155.945 rumah tangga sasaran dalam kategori miskin.

Menurut Suhendra (2006, h.75) pemberdayaan adalah memberikan kekuasaan kepada masyarakat melalui organisasi atau kelompok agar mampu menguasai atau berkuasa atas semua aspek kehidupannya meliputi aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi menurut Harahap (2012 h.82-83) adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran. Penguatan masyarakat dilakukan untuk mendapatkan upah, informasi, pengetahuan dan ketrampilan yang dilakukan baik oleh masyarakat sendiri maupun dari kebijakan pemerintah.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, dengan visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis,

Maju, Aman, Tertib, dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEP. Mengacu dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, maka visi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang tahun 2011-2015 adalah mewujudkan keseimbangan fungsi sumberdaya hutan, tanah dan air menuju masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera.

Kebijakan pemerintah yang dihasilkan dalam RPJMD dijabarkan menjadi perencanaan tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam penyusunannya melibatkan masyarakat sebagai komponen utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi menurut Abe (2005, h. 71-73) ada beberapa kesulitan yang dihadapi pada saat melakukan perencanaan berbasis masyarakat adalah masyarakat tidak mempunyai pendidikan formal yang memadai, keterbatasan baca-tulis dan keterbatasan pengetahuan. Kesulitan itu juga ditambah bahwa masyarakat telah terpengaruh sistem otoriter-sentralistik, dimana hanya mengekor, pasif, takut mengambil inisiatif dan hidup dalam budaya petunjuk. Melengkapi pendapat Abe, surat kabar harian haluan yang terbit pada tanggal 27 Desember 2010, menyebutkan bahwa masyarakat tidak lagi berminat untuk mengikuti musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan karena dianggap sebagai sebuah acara (Haluan, 2010, h.1).

Sesuai dengan rencana strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, maka Dinas Kehutanan Kabupaten Malang mempunyai program pengembangan usaha perhutanan dan peran serta masyarakat dengan nama kegiatan pengembangan aneka usaha kehutanan. Aneka usaha kehutanan merupakan hasil hutan non kayu sebagai alternatif peningkatan pendapatan masyarakat disekitar hutan. Kegiatan yang dikerjakan disela-sela kesibukan kepala keluarga untuk mengurus pertanian dan perternakan serta keterlibatan kaum perempuan disamping mengurus rumah tangga dalam mendapatkan tambahan penghasilan keluarga.

Beberapa produk aneka usaha kehutanan yang berkembang di Kabupaten Malang, seperti pengolahan bambu, perlembahan dan minyak atsiri di Kabupaten Malang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Potensi sumberdaya alam, seperti bambu, di Kabupaten Malang belum dimanfaatkan dengan baik. Bambu yang selama ini hanya dibiarkan tumbuh liar dibelakang rumah ataupun dipinggir-pinggir sungai. Padahal ketersediaan bahan baku bambu sangat dibutuhkan. Seperti halnya penelusuran Solopos (2013, h.1) pada tanggal 7 Juli 2013,

menyebutkan bahwa di Kabupaten Sragen, pengrajin sangkar burung mendapatkan pesanan yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Akan tetapi produksi malah turun sampai dengan 5% karena kekurangan bahan baku. Pasar dan harga jual yang menguntungkan bisa rusak jika tidak dibarengi dengan ketersediaan bahan baku.

Dari uraian diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perencanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha kehutanan di Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang perencanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sehingga dapat mengetahui perencanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha kehutanan yang tepat di Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis perencanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha kehutanan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1). Observasi, dengan melakukan pengamatan terhadap peristiwa pada kegiatan aneka usaha kehutanan di Kecamatan Wagir dan Kecamatan Turen, (2). Wawancara, dilakukan pada aparatur Pemerintah Daerah di Dinas Kehutanan, BAPPEDA dan Desa Wagir Kabupaten Malang serta masyarakat yang menekuni aneka usaha kehutanan, (3). Dokumentasi, berupa: RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, RKPD Kabupaten Malang Tahun 2013, Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2011-2015, Renja Dinas Kehutanan Tahun 2013, Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RP-RL) Kabupaten Malang dan Laporan-laporan yang berhubungan dengan kegiatan aneka usaha kehutanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme perencanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha kehutanan.

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kehutanan melihat aneka usaha kehutanan merupakan salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat.

Klasifikasi hasil hutan non kayu menurut Kasmudjo (2011, h.10-11) adalah: (1). Kelompok tumbuhan berkekuatan. (2). Kelompok produk ekstraktif, (3). Kelompok produk budidaya, dan (4). Kelompok minor produk hasil hutan non kayu. Perencanaan untuk pengembangan aneka usaha kehutanan dilakukan oleh Dinas Kehutanan bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan tetap terus memperhatikan lingkungan. Perencanaan menurut Tarigan (2004, h.3) berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat sekarang, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang tidak bisa dikontrol yang sesuai, memikirkan faktor-faktor yang menjadi pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Hasil dari RPJMD Kabupaten Malang akan menjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Kehutanan. Perencanaan tahunan dalam bentuk RKPD dan Renja diselesaikan dengan memperhatikan RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan serta usulan-usulan dari *stakeholder* yang lain, misalnya dari masyarakat. Peran aktif masyarakat ini yang diharapkan bisa membawa perubahan terhadap kesejahteraan mereka sendiri. Seperti pendapat Kartasmita (1994, h.9) dalam Riyadi (2004, h.4) bahwa pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang terencana. Begitu juga menurut Siagian (1994) dalam Riyadi (2004, h.4) yang melihat dari sisi pemerintah, bahwa pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).

Keinginan pemerintah untuk sejahterakan masyarakat terlihat dari visi Kabupaten Malang, yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Maju, Aman, Tertib, dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEP. Dari visi tersebut maka terdapat beberapa misi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha kehutanan, yaitu: Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Sebagai sebuah visi dan misi dari kepala daerah, bisa dikatakan bahwa ini merupakan kontrak politik kepala daerah dengan para

konstiteunnya. Myrdal dalam Syafrudin (1993, h.6) menyatakan bahwa perencanaan yang dilakukan ditetapkan dalam proses politik dengan tetap memperhatikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

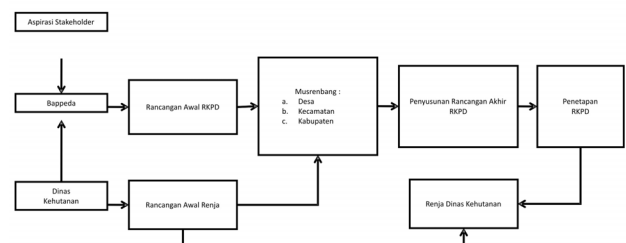
Mekanisme penyusunan RKPD tahun 2013 Kabupaten Malang digunakan dasar untuk pembuatan Renja Dinas Kehutanan tahun 2013 Kabupaten Malang. Mekanisme ini merupakan perwujudan dari keterpaduan perencanaan pembangunan nasional yang memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika di Kabupaten Malang. Penyusunan RKPD dan Renja kegiatan pengembangan aneka usaha kehutanan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dapat dilihat gambar 1.

Mekanisme perencanaan pengembangan aneka usaha kehutanan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan tidak menyalahi Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dimana tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah dilakukan melalui tahapan: (1). Penyusunan rancangan awal, (2). Pelaksanaan Musrenbang, (3). Perumusan rancangan akhir dan (4). Penetapan. Hal ini disebabkan dasar hukum pelaksanaan telah dilaksanakan dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Malang mempunyai 12 Kelurahan dan 378 Desa yang masuk dalam 33 Kecamatan. Alur musrenbang yang panjang dari mulai Desa sampai dengan Kabupaten menyebabkan masyarakat kurang antusias mengikuti musrenbang. Dengan perbandingan usulan Kelurahan dan Desa yang akan ditampung di Kecamatan menjadi pemicu pesimisme masyarakat terhadap hasil musrenbang. Begitu juga dengan perencanaan pengembangan aneka usaha kehutanan yang tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Usulan-usulan yang diajukan dalam musrenbang hanya bersifat fisik infrastruktur, sehingga pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha kehutanan terabaikan oleh masyarakat. Padahal menurut Peraturan Pemerintah no. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan menyatakan pengelolaan hutan perlu dilakukan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pelaksanaan musrenbang untuk mendapatkan usulan-usulan yang bersifat partisipatif dari masyarakat

tidak berjalan dengan baik, maka pendekatan perencanaan partisipatif dan *bottom-up* tidak bisa dilaksanakan. Wrihatnolo (2006, h. 161-162) menyebutkan pelaksanaan perencanaan partisipatif dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dalam musyawarah ini, perencanaan dilakukan bersama-sama dengan stakeholder, yang berasal dari aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniawan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non pemerintah dan lain-lain. Sedangkan pendekatan *bottom-up*, mencerminkan proses perencanaan dalam pemerintahan. Akan tetapi Awang (2008, h. 50-51) mempunyai Metode pemberdayaan yang bisa menjadi alternatif yaitu Partisipasi dan Aksi Kehutanan Masyarakat (PAKEM). Pada dasarnya PAKEM ini merujuk pada kerangka berfikir perencanaan pada umumnya dengan tahap penting dalam perencanaan yaitu tahap perencanaan partisipatif, yaitu perencanaan yang dilakukan sebelum kelapangan, kegiatan dilapangan dengan melakukan diskusi dan dialog hasil temuan. Dengan peran aktif perencana untuk datang ke masyarakat, kebutuhan masyarakat akan terlihat dengan jelas. Dari masalah dan kebutuhan masyarakat ini, yang akan menjadi pertimbangan perencana dalam membuat perencanaan.



Gambar 1. Proses Perencanaan Aneka Usaha Kehutanan
Figure 1. Various of forestry business Planning Process
Sumber : Data diolah

Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan untuk melakukan perencanaan kegiatan pengembangan aneka usaha kehutanan adalah pendekatan politis, teknokratik dan *top-down*. Pendekatan politis tercermin dari visi dan misi kepala daerah untuk dapat dilaksanakan dalam periode masa jabatan kepala daerah. Wrihatnolo (2006, h. 152-153) menjelaskan bahwa politisi menganggap sebagai *market of plan* untuk menawarkan program-program pembangunan. Janji-janji dalam kampanye tertuang dalam visi dan misi tersebut. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut perencana Dinas Kehutanan

membuat Renstra dan Renja untuk melaksanakan program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk dapat mencapai tujuan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pendekatan *top-down* terlihat dari hubungan antar dokumen perencanaan, mulai dari dokumen perencanaan nasional, provinsi, daerah dan SKPD. Menurut Wrihatnolo (2006, h. 161-162) pendekatan *top-down* mempunyai tujuan untuk meyelaraskan program-program agar dapat menjamin sinkronisasi dari semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pendekatan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, memerlukan penyempurnaan sehingga kegiatan aneka usaha kehutanan bisa berjalan dengan baik. Kegiatan musrenbang merupakan bagian penting dalam proses perencanaan, sehingga pendekatan politis, teknokratis dan *top-down* perlu mendapat dukungan dari masyarakat dalam bentuk aspirasi. Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti musrenbang ini, harus disikapi oleh Dinas Kehutanan dengan baik. Sosialisasi tentang pentingnya musrenbang harus gencar dilakukan, sehingga masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan kegiatan musrenbang tersebut untuk bisa mengakomodasi kebutuhan mereka.

Sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat memerlukan waktu yang tidak sedikit sehingga perlu ada strategi lain yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Strategi yang bisa dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang adalah dengan menggunakan metode pemberdayaan yaitu Partisipasi dan Aksi Kehutanan Masyarakat (PAKEM). Peran aktif dari penyuluh kehutanan maupun bagian perencana di Dinas Kehutanan bertemu dengan masyarakat untuk melakukan diskusi dan dialog dengan masyarakat. Aspirasi dari masyarakat bisa ditampung dan diakomodasi oleh Dinas Kehutanan dalam dokumen perencanaan pada tahun berikutnya.

Perencanaan dengan menambahkan metode PAKEM yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh

Dinas Kehutanan tidak salah sasaran. Dengan menggunakan metode PAKEM, 5 (lima) pendekatan perencanaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 telah terakomodasi seluruhnya. Pendekatan tersebut adalah pendekatan politis, teknokratis, *top-down*, *bottom-up* dan partisipasi.

Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha kehutanan

Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Budiman (1991, h. 1) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah, pemilikan lahan yang sempit dan tidak merata menjadi karakteristik masyarakat sekitar hutan. Dengan karakteristik tersebut maka perlu dikembangkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Suhendra (2006 h.75) menyebutkan konsep pemberdayaan sebagai salah satu alternatif pembangunan untuk merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif. Mekanisme perencanaan juga berubah seiring dengan perubahan paradigma tersebut. Partisipasi masyarakat diakomodasi dalam bentuk musrenbang sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No.P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat terutama dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Dinas Kehutanan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Malang tidak luput dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2013 yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Dengan pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah daerah Kabupaten Malang tidak ingin hanya berhenti

sampai disitu, tetapi bagaimana pemerataan sampai pedesaan. Hal ini sesuai dengan Pranarka (1996 h.45-70) dalam Harahap (2012 h.80-81) yang menyebutkan pemberdayaan merupakan Pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to everybody*) dan penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat.

Seperti di Kecamatan Wagir sebagai sentra pembuatan duparatus dan Kecamatan Turen sebagai usaha sangkar burung terus berusaha untuk mengembangkan usahanya agar menjadi lebih besar dengan kemitraan antara pengusaha dengan masyarakat sekitar sebagai penyuplai hasil kerajinan. Pengusaha-pengusaha tersebut mempunyai kemitraan dengan masyarakat sekitar, sebagai sebuah simbiosis mutualisme antara keduanya. Hal ini didukung dengan pernyataan Sumodiningrat (1999) dalam Harahap (2012 h.86-87) tentang konsep pemberdayaan ekonomi yaitu usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar dan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa pemberdayaan masyarakat disekitar hutan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan. Peningkatan kelembagaan masyarakat difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai dari pemenuhan ketersediaan bahan baku, modal kerja, keahlian masyarakat serta bantuan pemasaran barang. Terkait dengan aneka usaha kehutanan Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menurut Peraturan Pemerintah no. 34 tahun 2002 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.

Dari konsep-konsep pemberdayaan diatas pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka kehutanan adalah upaya pembagian kekuasaan dan penguatan kepada yang lemah tanpa mengancurkan yang kuat sehingga menjadi sama-sama kuat dengan meningkatkan manfaat sumberdaya hutan dan lahan secara optimal secara adil melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dalam rangka pemenuhan bahan baku, modal kerja, keahlian masyarakat, serta bantuan pemasaran

barang dalam rangka memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan.

Upaya memberdayakan masyarakat menurut Kartosasminto (1989) dalam Sumarmo (2006 h.83) dan Ardillah (2012 h.5-6) dapat dilakukan dengan: (1). Menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, (2). Memperkuat potensi yang dimiliki dan (3). Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Usaha pemberdayaan tersebut bisa dilakukan dengan perubahan struktur yang meliputi: (a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya. (b) penguatan kelembagaan. (c) penguasaan teknologi. dan (d) pemberdayaan sumberdaya manusia (Sumodiningrat, 1999 dalam Harahap, 2012 h.86-87).

Peran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan ini telah berkembang pada tahun 2006 dengan mendirikan *Working Group* Pemberdayaan atau lebih dikenal dengan WG Pemberdayaan. Kelompok kerja ini muncul pada saat berlangsungnya Pekan Raya Hutan dan Masyarakat di Yogyakarta pada tahun 2006. Dari WG Pemberdayaan ini kemudian lahir prinsip-prinsip untuk mengembangkan Model Desa Konservasi (MDK), prinsip-prinsip tersebut adalah (1). Penguatan jaringan informasi tentang teknis dan sistem produksi antara produk usaha sejenis, (2). Masyarakat ikut serta secara adil dalam jejaring pemasaran, (3). Adanya variasi usaha dan sumber-sumber mata pencaharian berdasarkan potensi lokal, (4). Produk yang ramah lingkungan dan tidak melebihi daya dukung SDA dan sosial, dan (5). Terjalannya kemitraan antar kelompok ekonomi masyarakat dengan pelaku usaha serta kalangan yang peduli lingkungan dan kepentingan masyarakat. (Pemberdayaan, 2009, h.1).

Pemerintah daerah membuka diri untuk membuat iklim potensi masyarakat berkembang. Dari kata kunci visi Kabupaten Malang untuk RPJMD 2010-2015 memberikan gambaran tentang keinginan dari pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk memberdayakan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan dari masyarakatnya. Dukungan kebijakan Pemerintah Daerah menjadi modal awal untuk mengembangkan aneka usaha kehutanan. Kebijakan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan pendapat Sumodiningrat (1999) dalam Harahap (2012, h.86-87) yaitu: (a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya

modal). (b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. (c) penguatan industri kecil. (d) mendorong munculnya wirausaha baru. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang adalah dengan melakukan sosialisasi tentang aneka usaha kehutanan sehingga bisa mendorong pengrajin baru yang menekuni usaha ini. Usaha yang tidak mensyaratkan tingkat pendidikan formal dan semakin sulitnya lapangan kerja menjadikan usaha ini bisa tumbuh dan berkembang. Upaya lain yang dilakukan adalah Mengupayakan akses/link dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, BUMN dan Swasta sehingga bisa melakukan kerjasama untuk mengembangkan aneka usaha kehutanan di Kabupaten Malang.

Usaha Dinas Kehutanan untuk memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam penelitian ini adalah dengan (1). Memberikan bantuan modal kerja untuk meningkatkan produktifitas usaha, (2). Pembentukan kelompok tani dan pembinaan kelembagaan, (3). Memberikan bantuan bibit untuk menjaga keberlangsungan bahan baku sekaligus sebagai usaha untuk melakukan konservasi alam., (4). Melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, BMUN dan swasta, (5). Melakukan pembinaan teknis dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan.

Usaha Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dalam mengembangkan aneka usaha kehutanan terkendala dengan masalah anggaran. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan pengembangan aneka usaha kehutanan tidak mencukupi pelaksanaan kegiatan pengembangan aneka usaha kehutanan secara optimal. Data yang didapatkan dari penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal kerja untuk peningkatan produktifitas usaha dilakukan pada tahun 2011 sedangkan pada tahun 2012 pemberian modal kerja tidak dilanjutkan dan diganti dengan pemberian bibit bambu untuk menunjang kerajinan bambu di Kabupaten Malang. Kegiatan yang tidak berkelanjutan dalam pengembangan aneka usaha kehutanan di Kabupaten Malang menjadikan usaha ini tidak berjalan dengan optimal. Keberhasilan dan kegagalan masyarakat dalam usaha ini tidak bisa di ukur secara objektif karena peran serta Dinas Kehutanan Kabupaten Malang tidak maksimal.

Perlindungan pada aneka usaha kehutanan dilakukan dengan cara menjaga ketersediaan bahan baku sehingga

usaha yang dilakukan oleh masyarakat bisa terus berjalan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumodiningrat (1999) dalam Harahap (2012 h.86-87) yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

Dari konsep-konsep pemberdayaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka kehutanan yang telah dikemukakan, dikaitkan dengan usaha pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, beberapa hal yang perlu dikembangkan adalah: (1). kapasitas kelembagaan, (2). ketersediaan bahan baku, (3). modal kerja, (4). keahlian masyarakat, (5). penguasaan teknologi serta (6). pemasaran barang. Terkait dengan usaha Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dalam pengembangan aneka usaha kehutanan, maka ketersediaan bahan baku harus menjadi prioritas karena sangat terkait dengan konservasi.

SIMPULAN

Perencanaan aneka usaha kehutanan oleh Dinas Kehutanan untuk meningkatkan manfaat sumberdaya hutan dan lahan secara optimal secara adil melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dalam rangka pemenuhan bahan baku, modal kerja, keahlian masyarakat, serta bantuan pemasaran barang dalam rangka memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan belum berjalan dengan optimal karena belum melibatkan masyarakat.

Pendekatan perencanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang menggunakan pendekatan politis, teknokratis dan *top-down*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta, Pembaruan.
- Ardilah, Muhammad Reza. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Hutan Rakyat dalam Pemeliharaan Kelestarian Hutan. *Jurnal Perspektif Sosiologi* [Internet]. Diunduh dari: <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/persos/article/view/2920>. Diunduh pada tanggal 16 Oktober 2013.
- Awang, San Afri. 2004. *Dekonstruksi Sosial Forestri*:

- Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*. Yogyakarta, Bigrif Publishing.
- _____. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Deliberative (Sekolah Riset) KTM 605: Bahan Ajar Program Studi Ilmu Kehutanan (PSIK)*. Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2013a. Data Kejadian Bencana Banjir [Internet]. Diunduh dari <http://geospasial.bnpb.go.id/pantauanbencana/data/databanjirall.php>. Diunduh pada tanggal 15 Mei 2013.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2013b. Data Kejadian Bencana Tanah Longsor [Internet]. Diunduh dari <http://geospasial.bnpb.go.id/pantauanbencana/data/datalongsorall.php>. Diunduh pada tanggal 15 Mei 2013.
- Budiman, Ahmad. 1991. *Studi Diagnosa Permasalahan Interaksi Masyarakat dan Hutan di Taman Nasional Baluran* [Internet]. IPB. Diunduh dari :http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/25249/prosiding_seminar_III_hasil_penelitian_perhutanan-20.pdf?sequence=1. Diunduh pada tanggal 10 Juni 2013.
- Haluan, Harian. 2010. Musrenbang Dinilai Tidak Penting Lagi. [Internet]. Diunduh dari http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74%3Amusrenbang-dinilai-tak-penting-lagi&Itemid=89. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2013.
- Harahap, Erni Febriana. 2012. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tanggung dan Mandiri." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* [Internet], 3 (2): pp. 78-96. Diunduh dari :<http://jurnal.unitas-pdg.ac.id/files/31/Jurnal%20Manajemen/Vol%203%20Mei%202012/5.Erni%20Febriana%20Harahap-Pemberdayaan%20Masyarakat%20Dim%20Bid.%20Ekonomi.pdf>. Diunduh pada tanggal 2 Juni 2013.
- Kasmudjo. 2011. *Hasil Hutan Non Kayu: Suatu Pengantar Klasifikasi, Potensi, Pemungutan, Pengolahan, Kualitas dan Kegunaan*. Yogyakarta, Cakrawala Media.
- Pemberdayaan, WG. 2009. *Ekonomi Desa Meningkatkan dengan Model Desa Konservasi (MDK)* [Internet]. Diunduh dari <http://wgpemberdayaan.org/desa-konservasi/ekonomi-desa-meningkat-dengan-model-desa-konservasi-mdk>. Diunduh pada tanggal 11 November 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Riyadi. Dedy Supriyadi Bratasumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Soemarmo. 2006. *Model Perencanaan Sumber Daya Hutan untuk Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Malang, Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Solopos, 2013. Pengrajin Sangkar Burung Sragen Kesulitan Bambu. [Internet]. Diunduh dari: <http://www.solopos.com/2013/07/07/perajin-sangkar-burung-sragen-kesulitan-bambu-423286>. Diunduh pada tanggal 19 Desember 2013.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Alfabeta.
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Wrihatnolo, Randi R., Riant Nugroho D.. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta. PT Elex Komputindo–Kelompok Gramedia.